

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kasus eksploitasi seksual komersial anak telah dijadikan sebagai salah satu isu internasional. Bentuk-bentuk eksploitasi seksual komersial anak yang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini adalah prostitusi anak, perdagangan anak, pornografi anak dan pariwisata seks anak. Dalam kasus ini, nilai-nilai dari hak asasi manusia seperti kebebasan, mendapat hidup yang layak, mendapat pendidikan, memperoleh martabat dan memperoleh kesejahteraan telah dilanggar. Maka dari itu, penting bagi semua pihak untuk menangani kasus semacam ini, perlu ada gerakan bersama dalam memberantas kasus ESKA, hal ini dilakukan oleh organisasi internasional seperti ECPAT Indonesia bersama pemerintah serta organisasi lokal yang bergerak dalam perlindungan anak dan memberantas kejahatan seksual anak dengan melakukan beberapa upaya yaitu *setting agendas, negotiating outcomes, conferring legitimacy* dan *making solution work*.

Sebagai *setting agendas*, NGO memainkan perannya dalam memaksa para pemimpin dan pembuat kebijakan agar lebih memperhatikan suatu isu. ECPAT Indonesia sebagai NGO melakukan berbagai upaya agar pemerintah, masyarakat maupun privat sektor lebih memperhatikan isu ESKA ini. Dimana kasus ini terus mengalami peningkatan dan memang sudah sepatutnya penanganan ESKA harus ditingkatkan. Salah satu daerah yang mengalami peningkatan terhadap kasus ESKA adalah Bali. Langkah yang diambil oleh ECPAT dalam kasus di Bali yaitu pada

tingkat provinsi melakukan implementasi UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak serta dengan bekerjasama dengan berbagai lembaga terkait, pada tingkat desa ECPAT bekerjasama dengan Ketut Widana Kepala Desa Kaliasem guna untuk memberikan kesadaran pada masyarakat.

Sebagai *negotiating outcomes*, INGO dapat bertindak sebagai ahli dalam melakukan negosiasi terkait suatu isu. ECPAT Indonesia merupakan INGO yang fokus dalam menghapuskan eksploitasi seksual komersial anak. Selain itu, ECPAT Indonesia juga bisa menjadi aktor ketika pemerintah tidak dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari kasus ESKA.

Selanjutnya *conferring legitimacy*, INGO dapat menarik kepercayaan publik dalam membangun suatu jaringan. Walaupun awal pembentukan ECPAT cukup sulit dan adanya hambatan dari masyarakat dimana terdapat kelompok masyarakat tertentu yang sengaja melakukan penggaran sistem, seperti perusahaan biro perjalanan, hotel, restoran maupun pihak akomodasi lainnya yang terhubung dengan pengguna jasa seks anak. Namun dengan terus berupaya melakukan penyebarluasan informasi tentang ESKA melalui seminar, diskusi dan konferensi, akhirnya ECPAT mendapatkan kepercayaan dan dukungan dengan membangun kolaborasi bersama pihak-pihak kunci lintas sektor

Cara yang terakhir adalah *making solution work*, keberadaan INGO dikenal dapat menerapkan solusi karena statusnya yang netral dan efektif. Selain itu INGO juga dapat melakukan apa yang pemerintah tidak bisa lakukan. INGO seperti ECPAT berperan sebagai pihak pemberi bantuan luar negeri berupa bantuan teknis dalam hal pengawasan program nasional, usaha-usaha advokasi dan kampanye ESKA.

Melihat upaya yang sudah dijalankan oleh ECPAT dalam menangani kasus ESKA di Indonesia tersebut, dapat disimpulkan bahwa ECPAT berperan aktif sehingga membuat perubahan bagi masyarakat Indonesia dalam memandang isu kejahatan ESKA. Upaya yang dilakukan ECPAT dalam menangani kasus ini diharapkan setidaknya bisa menekan angka kenaikan pada kasus kejahatan ESKA.

5.2 Saran

Eksplorasi seksual komersial anak merupakan sebuah ancaman bagi seluruh masyarakat, khususnya anak-anak. Walaupun, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggapinya dan mengeluarkan aturan permasalahan ini sebagai sebuah aktivitas yang terus berlanjut dan tidak berhenti. Hal ini disebabkan, ketika suatu negara meratifikasi atau membuat kebijakan terkait konvensi yang diratifikasinya, proses ini hanya berlangsung sampai ratifikasi. Negara kurang bekerjasama dan melakukan sosialisasi kebijakan ini dengan semua lapisan masyarakat sehingga mengakibatkan negara gagal dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Terbukti dengan beberapa kebijakan yang dibuat tidak bisa terimplementasi dengan baik, karena faktor kurangnya sumber daya dan pemerintah yang masih korupsi.

Upaya yang dilakukan oleh ECPAT dinilai sudah cukup baik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, karena program ECPAT menjangkau seluruh lapisan masyarakat, seperti melakukan advokasi serta meningkatkan kesadaran banyak masyarakat. Saran dari penulis adalah sebaiknya pemerintah lebih terbuka terhadap laporan kasus eksploitasi seksual komersial anak yang terjadi di Indonesia. Selain itu, diharapkan agar pemerintah mengeluarkan laporan tahunan secara rinci

dari kegiatan yang mereka lakukan sebagai bentuk upaya menangani kasus ESKA. Sehingga, ini akan menjadi sumber dan pelajaran yang berharga bagi peneliti dan organisasi yang ingin membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Indonesia.

